

kombinasi

KOMUNITAS MEMBANGUN JARINGAN INFORMASI

Edisi ke-73 2019 • combine.or.id



Perempuan, Literasi Digital, dan Ketimpangan

ISSN 0852-1190



9 770852 119007

PETUNJUK CARA BACA

saran untuk membaca Majalah e-Kombinasi

Majalah elektronik ini dirancang untuk bisa nyaman dibaca menggunakan gawai dengan beragam merek maupun versi. Untuk menambah kenyamanan membaca, silakan mengikuti petunjuk berikut :

- Buka majalah e-Kombinasi dengan aplikasi baca buku elektronik di gawai anda
- Sejumlah aplikasi akan langsung menampilkan isi majalah sesuai layar gawai anda tanpa melalui pengaturan khusus
- Jika aplikasi baca yang anda gunakan tidak langsung menampilkan isi majalah sesuai layar gawai anda, silakan masuk ke pengaturan aplikasi tersebut
 1. Klik bagian Pembesaran
 2. Pilih Paskan ke Layar [\(Fit to Width\)](#)
 3. Gunakan pengaturan pengguliran vertikal

Selamat membaca!



kombinasi

KOMUNITAS MEMBANGUN JARINGAN INFORMASI

Pemimpin Redaksi: Ferdhi F. Putra

Redaktur Pelaksana: Lamia Putri Damayanti

Tim Redaksi: Lamia Putri Damayanti

Kontributor: Herman Degei, Idha Saraswati,
Kathleen Azali

Grafis dan Tata Letak: Hamzah Ibnu Dedi

Ilustrasi: Aliem Bakhtiar

Sampul Depan: Aliem Bakhtiar

Sekretariat: Ulfa Hanani

Distribusi: Rani Soraya Siregar, Sarjiman

PERNYATAAN

Semua isi tulisan dari para kontributor yang diterbitkan dalam majalah ini menjadi tanggung jawab masing-masing kontributor. Isi majalah menggunakan lisensi CC BY NC 4.0 sehingga boleh dipublikasikan ulang, diperbanyak, maupun diedarkan sepanjang mencantumkan sumber dan nama penulis serta tidak digunakan untuk komersial.



Combine Resource Institution (CRI) adalah lembaga nirlaba yang beritikad mendorong terciptanya warga berdaya secara ekonomi, sosial, budaya dan politik, melalui pengelolaan informasi berbasis komunitas. Kami mendorong penguatan institusi dan jejaring warga, serta kapasitas komunitas di bidang informasi tata kelola sumber daya. Kami juga mengembangkan pengetahuan dengan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi serta komunikasi.



DAFTAR

EDITORIAL **5**

ISI

UTAMA

8 Perempuan, Literasi, dan Ketimpangan Digital

22 Perempuan dalam Arus Perkembangan Teknologi Digital

32 Media Sosial dan Privasi

LUMBUNG KOMUNITAS

38 Bukuntukpapua: Sekrup Kecil Roda Literasi Papua

WARTA CRI

47 Berdaya dengan Data melalui Pemanfaatan SID Berdaya

50 Kelola Sampah Rumah Tangga Bisa Jadi Alternatif Kendalikan Timbunan Sampah

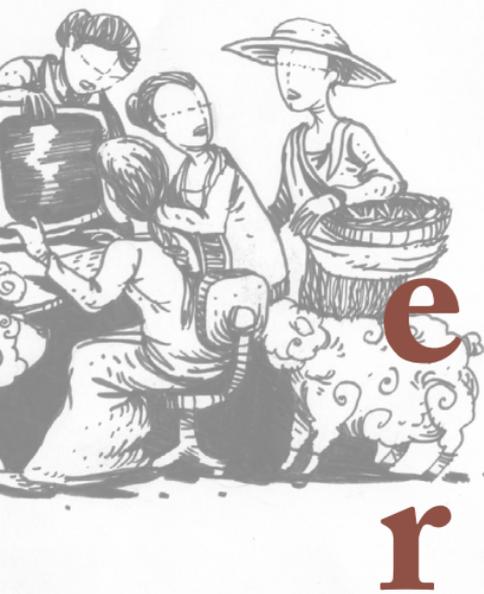
53 Pengetahuan Terbuka Beri Peluang yang Sama Bagi Warga

57 Perempuan Berdaya Lindungi Diri di Media Sosial

61 AJW 2019 dan Cerita-Cerita Menarik dari Desa

KOMIK: Data Pribadi Harga Mati 68





edito- rial

Perbincangan mengenai gender dan internet sudah berlangsung sejak dekade terakhir, seiring dengan perkembangan teknologi digital itu sendiri. Isu ketimpangan antara laki-laki dan perempuan masih menjadi isu utama. Bahkan sejak awal isu ini berkembang, hingga kini ketimpangan tersebut belum juga membaik. Beberapa penelitian coba membuktikan bahwa kesenjangan gender di internet semakin menurun. Pada 2005, Pew Internet & American Life Project mengungkapkan selisih pengguna internet di Amerika Serikat pada tahun tersebut hanya 4 persen; laki-laki 61 persen, perempuan 57 persen.

Temuan itu menjadi sangat kasuistik karena penelitiannya hanya dilakukan di Amerika Serikat. Faktanya, sepuluh tahun kemudian, World Wide Web Foundation menemukan bahwa kesenjangan gender di internet di negara-negara berkembang masih berada jauh dari harapan kesetaraan. Jika beberapa tahun terakhir isu kesenjangan gender (*gender gap*) di Amerika Utara dan Eropa meluas pada soalan keterlibatan perempuan di industri teknologi digital, di negara-negara berkembang isunya masih berkuat pada soalan-soalan dasar, yakni akses terhadap internet. Perempuan di

wilayah-wilayah seperti Asia, Afrika dan Amerika Selatan, 50 persen lebih rendah peluangnya untuk mengakses internet dibandingkan laki-laki. Di beberapa daerah, meski tingkat kepemilikan ponsel antara perempuan dan laki-laki hampir merata, peluang perempuan untuk mengakses internet melalui ponselnya pun masih lebih kecil dibanding laki-laki. Sebabnya, perempuan tidak memiliki sumber penghasilannya sendiri.

Menurut riset World Wide Web Foundation, ekonomi dan pendidikan, lagi-lagi, menjadi akar masalah ketertinggalan perempuan dunia ketiga pada bidang ini. Sebagian besar informan penelitian mengatakan bahwa alasan mereka tidak menggunakan internet adalah karena mereka tidak tahu cara menggunakannya. Seorang informan asal Indonesia mengaku bahwa mengenal komputer dan internet bukan perkara mudah. “Bagi saya, belajar komputer dan internet sangat memakan waktu dan sulit untuk mengerti bahasanya karena kebanyakan menggunakan bahasa Inggris.” Pengalaman Combine Resource Institution mengelola lokakarya literasi digital untuk kaum perempuan memperkuat pernyataan-pernyataan itu. Sejumlah kasus membuktikan bahwa perempuan, terutama ibu rumah tangga, bahkan tidak menguasai gawainya sendiri. Dari sejak membeli gawai hingga membikin akun media sosial, mereka dibantu oleh orang lain. Alasannya: mereka tidak tahu cara mengoperasikannya. Situasi ini yang kemudian membawa dampak lebih jauh, yakni soal ancaman privasi terhadap perempuan.

Ketergantungan pada orang lain membuat perempuan tak berdaulat atas gawainya. Padahal hari ini, gawai menjadi semacam identitas pribadi. Gawai menyimpan data-data privasi yang boleh

jadi sangat sensitif dan terlarang diketahui orang lain. Kerentanan ini sebenarnya yang kian hari kian mengkhawatirkan, yang tercermin dari makin maraknya kekerasan siber terhadap perempuan di dunia maya. Sebanyak 7 dari 10 perempuan berusia 18-24 tahun yang menggunakan internet secara rutin pernah mengalami kekerasan siber (World Wide Web Foundation, 2015).

Jika pendidikan adalah akar masalah ketertindasan perempuan di ranah internet, maka literasi digital bagi perempuan menjadi solusi wajib. Literasi digital tidak dimaknai secara sempit sebagai perkara bagaimana menggunakan internet atau memilah informasi di internet saja, tetapi juga soal bagaimana mengantisipasi kerentanan atau ancaman kejahatan di dunia maya. Tidak melulu mengenalkan internet secara positif--misalnya, soal potensi berwirausaha di internet, melainkan juga soal bahaya yang mengintai di dalamnya. Dengan demikian internet akan dipahami secara utuh, baik secara positif maupun negatif, sehingga memungkinkan perempuan untuk lebih waspada terhadap kerentanan di dunia maya. Dan yang tak kalah penting, adalah tugas kita bersama untuk menjadikan internet sebagai ruang aman bagi perempuan, lebih jauh, bagi umat manusia.



Perempuan, Literasi, dan Ketimpangan Digital

Kathleen Azali

*Direktur pendiri c2o library & collaborative
dan Research Associate di Institute of
Southeast Asian Studies (ISEAS).*





Literasi digital seringkali dipahami sebagai kemampuan kritis dalam mengonsumsi atau memahami informasi dari medium digital/elektronik, atau sebagai bagian dari literasi media. Namun sebetulnya, tidak ada kriteria baku literasi digital, apalagi karena teknologinya berkembang pesat dan makin kompleks. Jumlah data yang diproses pun makin besar. Ponsel saat ini memediasi berbagai aspek kehidupan sehari-hari: mulai dari weker, mengatur janji ketemuan, berkomunikasi dan foto dengan pasangan, keluarga dan orang-orang dekat maupun jauh, urusan kerjaan dan tagihan pelanggan, menghibur diri, mengajukan klaim BPJS, merekam dan menyebarkan ke mana kita pergi, mendapatkan ojek, menjual beli barang maupun jasa, dan sebagainya. Dengan banyaknya informasi yang diproses, dan terhubung dengan berbagai gawai dan *database* lain, tak heran banyak orang merasa kelabakan dengan *information overload* dan sulit fokus.

Dalam artikel “Tiga Aspek Literasi digital: Mengapa Ponsel Membuat Anda Sulit Fokus,” Sugino mengutip hasil survei CIGI-Ipsos 2016, bahwa “sebanyak 65% dari 132 juta pengguna internet di Indonesia percaya dengan kebenaran

informasi di dunia maya tanpa pengecekan ulang lebih dulu.” Sugino kemudian menawarkan perlunya memperhatikan tiga aspek literasi digital: kesadaran data (*data awareness*), kemampuan analisis data, dan kemampuan untuk fokus (*deep work*).

Namun, meskipun aspek literasi digital yang dipaparkan Sugino ini penting, perlu ditegaskan bahwa kita perlu berhati-hati untuk tidak memandangnya semata sebagai isu kesadaran dan kompetensi pribadi. Memandang literasi digital semata sebagai kompetensi berisiko menyederhanakannya sebagai *masalah pribadi* dan bukannya *masalah struktural*. Dengan kata lain, pandangan ini bisa melihat bahwa kalau kamu terkena misinformasi, disinformasi, mudah terdistraksi atau data pribadimu tersebar tanpa sepengetahuanmu, itu salahmu sendiri karena kamu kurang kompeten, tidak berpikir kritis, tidak disiplin. Padahal, tidak selalu ini sepenuhnya tanggungjawab pengguna. Yang perlu kita cermati juga dalam pengembangan literasi digital adalah bagaimana struktur sosial, ekonomi, politik, dan teknologi menciptakan kondisi tersebut.

Mari kita lihat bagaimana teknologi dan infrastruktur berperan. Dalam hal terdistraksi, kecanduan dan sulit fokus, nyatanya ponsel dan media sosial memang seringkali dirancang oleh pembuatnya untuk membuat kecanduan (*addiction by design*). Facebook, misalnya, dalam catatan internalnya jelas mengetahui bahwa anak-anak dan orangtuanya tidak menyadari bahwa dalam banyak kliknya, mereka sedang melakukan berbagai pembelian—sesuatu yang baru mereka sadari belakangan ketika tagihan kartu kredit datang membengkak. Meskipun tahu bahwa penipuan sering terjadi, Facebook toh mendorong pengembang aplikasi untuk sengaja mengaburkan



proses pembelian tersebut, mengatakannya sebagai “*friendly fraud* (penipuan ramah)” (Halverson, 2019). Belum lagi berbagai penyalahgunaan, pelanggaran privasi, dan penyimpanan kata sandi dan data pribadi pengguna dengan tidak aman yang dilakukan oleh Facebook (Newman, 2018)—sesuatu yang cukup umum dan pernah dilakukan juga oleh platform besar seperti Go-Jek, LinkedIn, BukaLapak.

Tak heran, banyak petinggi perusahaan teknologi sendiri sangat ketat membatasi penggunaan media sosial mereka. Steve Jobs, yang lama menjadi CEO Apple, menyatakan bahwa dia sangat membatasi penggunaan iPhone dan iPad anak-anaknya. Mark Zuckerberg, CEO Facebook, menugaskan beberapa asisten pribadi untuk menangani akun Facebooknya. Banyak dari mereka mengirim anak-anaknya ke sekolah elit di mana tablet dan ponsel tidak boleh digunakan. Jelas, mereka sendiri sangat memahami dampak buruk teknologi yang mereka buat (lihat *Ledger of Harms*, Center for Humane Technology, 2018). Namun bagaimana dengan orang yang tidak memiliki asisten pribadi, misal perempuan yang harus memperbarui etalase dagangan toko daringnya di media sosial dan merespons *japri* (jalur pribadi-red) sembari mengurus anaknya yang tak mau berhenti menangis kecuali disodori ponsel atau tablet—yang memang dirancang dengan canggih untuk membuat anak-anak maupun dewasa kecanduan?

Ketimpangan digital

Semakin lama, apalagi dengan makin banyaknya orang terhubung ke internet, dan makin banyaknya urusan pekerjaan, kesehatan, pembayaran tagihan dilakukan secara daring, seiring dengan digenjoaknya

sistem *e-government* dan banjir notifikasi, kesenjangan digital (*digital divides*) bukan semata mengenai mereka yang terhubung ke komputer dan internet dengan yang tidak. Namun juga mengenai siapa yang mempunyai cukup sumber daya untuk bisa menentukan, mengendalikan kegiatan dan datanya online (Susaria, 2019). Pada kenyataannya, banyak orang tidak memiliki sumber daya dan modal ekonomi, pendidikan, akses teknologi yang kita nikmati.

Misalnya, ada jutaan orang, di Indonesia dan juga negara-negara lainnya, yang mengatakan mereka menggunakan Facebook, tapi tidak sadar bahwa mereka menggunakan internet (Mirani, 2015). Sebelum kita tertawa menghakimi atau meledek, perlu diingat bahwa untuk banyak pengguna, terutama dari kelas sosial ekonomi lemah, akses internet ke paket data murah hanya sebatas Facebook (atau WhatsApp, Instagram, yang sama-sama dimiliki Facebook) dan beberapa situs atau aplikasi lainnya. Ada juga peran operator telekomunikasi. Situs Internet.org buatan Facebook bekerjasama dengan operator-operator besar seperti Telkomsel, Indosat, 3, untuk memberi akses internet “gratis” tanpa enkripsi SSL—yang berarti data pribadi kita, termasuk kata sandi, dapat dengan mudah dibaca dan dipertukarkan—ke Facebook dan beberapa situs seperti KapanLagi, Tokopedia, OLX (Brodkin, 2015; Suzuki & Sharma, 2015). Operator menawarkan paket-paket data murah khusus untuk Instagram atau YouTube saja.



**“Pada kenyataannya,
banyak orang tidak
memiliki sumber daya
dan modal ekonomi,
pendidikan, akses
teknologi yang kita
nikmati.”**

Dalam kondisi seperti itu, memverifikasi informasi di situs lain seperti Google, Wikipedia, apalagi jurnal ilmiah dan sebagainya, jelas tidak mudah dan membutuhkan ongkos tambahan yang tidak semua orang mampu luangkan.

Sekarang mari kita lihat lebih jauh bagaimana kondisi sosial ekonomi berperan. Dalam tulisannya “Para Ibu yang Terabaikan Dalam Pusaran Hoaks,” Karlina Octaviany (2019) memaparkan bagaimana banyak ibu-ibu di Jakarta tidak tahu apa itu peramban (*browser*), “tidak mengerti paket data, cara koneksi WiFi kelurahan, sulit mengetik di layar sentuh, hingga tidak mengetahui ada menu internet selain media sosial. . . Jangankan bicara keamanan data, kontrol atas akses media sosial pun seringkali bukan di tangan ibu sebagai pemilik akun. Para ibu kerap dibuatkan akses masuk ke Facebook oleh sang anak.”

Sejujurnya saya sering menjumpai kasus serupa di Surabaya, dan tidak melulu di kalangan ibu-ibu—bapak-bapak dan anak muda juga. Tidak semua anak muda atau milenial otomatis menjadi *digital native*¹, terutama mereka dari ekonomi lemah yang baru pertama kali membeli HP. Tidak selalu anaknya juga yang mengajari—seringkali penjual HP yang menyiapkan setelan ketika orang pertama kali membeli HP dengan kebingungan, memasukkan sembarang email dan kata sandi. Dalam hal ini, selain dimensi ketidakadilan gender yang membuat perempuan habis waktunya karena harus menanggung kerja-kerja domestik, modal ekonomi dan akses informasi juga berperan besar dalam ketimpangan literasi. Ibu rumah tangga yang bekerja mengelola berbagai akun media sosial (entah untuk berjualan, atau sebagai “mimin”, *content creator*, *buzzer*, *social media strategist*, dan sebagainya) mungkin akan memiliki pengalaman berbeda. Barangkali dia tahu apa itu *browser* dan paket data, tapi mungkin tak punya banyak waktu untuk melakukan verifikasi karena harus disambi melakukan kerja-kerja domestik seperti menjaga anak, memasak, dan sebagainya. Atau mungkin dia melakukan verifikasi melalui media yang dia percaya, yang belum tentu sama dengan kita. Situasi menjadi semakin rumit ketika media-media utama semakin terkonsentrasi ke tangan segelintir perusahaan dan pemodal yang terkait dengan partai politik (Tapsell, 2018). Tak heran, orang pun banyak yang sangsi dan tidak percaya pada media-media besar, dan mempercayai media komunitasnya—yang bisa jadi menurut kita “abal-abal” (lihat paradoks literasi media ini di boyd, 2017).

¹ Asumsi bahwa anak muda selalu lebih paham teknologi ini sudah banyak dibantah dalam berbagai kajian literasi digital. Lihat boyd (2014, bab 7), Polimpung (2018).



Yang perlu digarisbawahi, sistem otomasi, kode, algoritma, seperti semua teknologi, tidaklah netral. Teknologi dibuat oleh manusia, dan karenanya memuat bias dari pemikiran, norma, dan kebijakan yang berlaku. Sudah banyak berita dan kajian yang memaparkan diskriminasi algoritma, bagaimana algoritma otomasi meneruskan, memperparah bias yang ada di masyarakat, termasuk seksisme, rasisme (Matsakis, 2018), dan memperlebar jurang kesenjangan kelompok ekonomi lemah dan marjinal—bahkan “mengotomasi ketidaksetaraan” (Eubanks, 2018). Ini bukan berarti kita menolak otomasi atau teknologi digital. Namun literasi perlu dikembangkan dengan pemahaman dimensi struktural yang menciptakan konteks berbeda-beda untuk tiap orang dan kelompok.

Perempuan dan literasi digital

Bagaimana dengan perempuan? Apakah perempuan tidak cocok bekerja di teknologi karena lebih *gapték* atau tidak kompeten dalam teknologi digital? Jelas tidak! Ada banyak perempuan yang bekerja dalam—dan memelopori—teknologi informasi, tetapi dipersulit oleh berbagai norma dan kebijakan patriarkis, dan dihilangkan dari sejarah. Kita tahu perempuan-perempuan pelopor teknologi seperti Ada Lovelace, pencipta program komputer pertama di abad ke-19; Hedy Lamarr, penemu teknologi *frequency hopping* pada zaman Perang Dunia yang digunakan sebagai dasar teknologi bluetooth; Katherine Johnson yang menangani berbagai kalkulasi rumit NASA dan banyak perempuan “*human computer*” lainnya.

Saat ini bidang IT didominasi laki-laki dan perempuan terlihat hanya segelintir. Namun sebagaimana digambarkan dalam buku dan

“Baru beberapa tahun ini prestasi “figur-figur tersembunyi” ini mulai digali dan dimunculkan. Lebih menyedihkan lagi, kebanyakan harus mengakhiri karirnya ketika mereka hamil/punya anak—”

film *Hidden Figures*, mayoritas programmer komputer dulu adalah perempuan—bahkan istilah “komputer” pada zaman dahulu merujuk ke ratusan, ribuan perempuan komputer hidup ini (Light, 1999). Namun mereka dipersulit dan direndahkan oleh berbagai norma, protokol, kebijakan yang patriarkis, di mana laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah, sementara tanggungjawab kerja domestik mengurus rumah dan anak sepenuhnya diserahkan ke perempuan. Berbeda dengan laki-laki, banyak perempuan berbakat ini tidak menerima pengakuan dan imbalan yang layak atas kerjanya, atau dihilangkan dari sejarah. Baru beberapa tahun ini prestasi “figur-figur tersembunyi” ini mulai digali dan dimunculkan. Lebih menyedihkan lagi, kebanyakan harus mengakhiri karirnya ketika mereka hamil/punya anak—entah karena diberhentikan kerja, tidak ada cuti hamil, dan tidak adanya kebijakan tempat kerja yang mendukung melanjutkan kerja sementara



mereka dituntut untuk menangani urusan domestik rumah tangga (Abbate, 2012).

Ini tidak hanya merugikan perempuannya sendiri, tetapi juga menghambat kemajuan teknologi. Inggris, yang pada zaman Perang Dunia II berada di posisi terdepan dalam teknologi komputer—Inggris adalah negara pertama yang merakit dan menggunakan komputer digital, elektronik sebelum proyek ENIAC fungsional di Amerika—kehilangan posisi terdepannya karena banyak talenta komputer perempuan yang mereka singkirkan dan mereka memilih untuk merekrut ulang laki-laki (Hicks, 2017). Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan besarnya potensi industri komputer, perempuan semakin dipinggirkan dari bidang ini. Beberapa jurusan ilmu komputer mulai dibuka di universitas-universitas *Ivy League* bergengsi di Amerika di tahun 1960an, di mana saat itu perempuan tidak diperbolehkan masuk (Ensmenger, 2010).

Saat ini, isu ketimpangan gender dalam bidang teknologi informasi makin sering disorot, dan makin banyak digalang program yang mengajarkan literasi, *digital marketing* dan *programming* untuk perempuan. Meskipun bertujuan baik, jika penerapannya tetap dengan norma dan kebijakan patriarki, maka program-program ini berisiko malah menambah tanggung jawab dan beban kerja perempuan tanpa memberi pengakuan, imbalan, atau pembagian kerja yang layak. Misalnya, tentu, dapat berjualan di media sosial atau toko daring bisa menambah penghasilan, tapi juga ada ongkos dan kerja tambahan. Siapa yang akan menanggung kerja tambahan tersebut? Apakah selain menjadi *customer service* melayani japri pelanggan, membuat foto dan video promo, membungkus dan

mengirimkan paket ke kurir, memeriksa tagihan dan pembayaran, dan sebagainya—perempuan masih tetap dituntut menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab atas kerja-kerja domestik seperti membersihkan rumah, mengasuh dan mengajari anak literasi digital?

Pelatihan *coding* sekarang pun makin semarak, banyak yang khusus untuk perempuan, apalagi dengan semakin digenjotnya industri digital di Indonesia. Namun pertanyaannya: apakah menguasai *coding* menjamin peningkatan penghasilan atau kesejahteraan? Atau, untuk memplesetkan judul buku Muhtar Habibi (2016), akan meningkatkan surplus pekerja dalam kapitalisme digital pinggiran, dengan jumlahnya membludak dan daya tawar rendah (Tarnoff 2017)?

Literasi digital, karenanya, tidak dapat dilihat sekedar sebagai kompetensi individu yang perlu ditingkatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah—tetapi perlu dikembangkan dengan kesadaran akan struktur sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang membentuknya. Untuk memplesetkan satu judul buku Paulo Freire dan Daniel Macedo (1987) tentang literasi: literasi digital bukan hanya membaca data, tapi juga membaca dunia.

Referensi

boyd, danah, “Did Media Literacy Backfire?” *Data & Society Points*, 5 Januari 2017. <https://points.datasociety.net/did-media-literacy-backfire-7418c084d88d>

Brodkin, Jon, “Facebook’s free Internet for the poor leaves out high-bandwidth sites,” *Ars Technica*, 4 Mei 2015. <https://arstechnica.com/information-technology/2015/05/facebooks-free-internet-for->



the-poor-leaves-out-high-bandwidth-sites/

Center for Humane Technology, “Ledger of Harms”, terakhir diperbaharui 14 Desember 2018 <https://ledger.humanetech.com/>

Ensmenger, Nathan L. 2010. *The Computer Boys Take Over: Computers, Programmers, and the Politics of Technical Expertise*. Cambridge & London: The MIT Press.

Eubanks, Virginia. 2018. *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police and Punish the Poor*. New York: Macmillan.

Freire, Paulo, and Donalddo Macedo. 1987. *Literacy: Reading the Word and the World*. London & New York: Routledge.

Halverson, Nathan, “Facebook knowingly duped game-playing kids and their parents out of money,” *Reveal News*, The Center for Investigative Reporting, 24 Januari 2019 <https://www.revealnews.org/article/facebook-knowingly-duped-game-playing-kids-and-their-parents-out-of-money/>.

Hicks, Marie. 2017. *Programmed Inequality: How Britain Discarded Women Technologists and Lost Its Edge in Computing*. Cambridge & London: The MIT Press.

Hicks, Marie. 2019. “How To Kill Your Tech Industry,” *Logic* vol. 5. <https://logicmag.io/05-how-to-kill-your-tech-industry/>

Light, Jennifer S. 1999. “When Computers Were Women.” *Technology and Culture* 40 (3): 455–83.

Matsakis, Louise, "What does a fair algorithm actually look like?" *Wired*, 10 November 2018 <https://www.wired.com/story/what-does-a-fair-algorithm-look-like/>

Mirani, Leo. 2015. "Millions of Facebook Users Have No Idea They're Using the Internet." *Quartz*. <http://qz.com/333313/millions-of-facebook-users-have-no-idea-theyre-using-the-internet/>.

Newman, Lily Hay, "Facebook Stored Millions of Passwords in Plaintext—Change Yours Now," *Wired* 21 Maret 2019. <https://www.wired.com/story/facebook-passwords-plaintext-change-yours/>

Octaviany, Karlina. "Para Ibu yang Terabaikan dalam Pusaran Hoaks," *Remotivi*, 13 Februari 2019 <http://www.remotivi.or.id/amatan/511/Para-Ibu-yang-Terabaikan-Dalam-Pusaran-Hoaks>

Polimpung, Hizkia Yosie, "Teknopolitika Kemudahan Hidup," *Indoprogres*, 4 Juni 2018 <https://indoprogres.com/2018/06/teknopolitika-kemudahan-hidup/>

Sugino, Agie Nugroho, "Tiga aspek literasi digital: mengapa ponsel membuat Anda sulit fokus," *The Conversation*, 28 Januari 2019. <https://theconversation.com/tiga-aspek-literasi-digital-mengapa-ponsel-membuat-anda-sulit-fokus-103062>



Susaria, Anjana. 17 April 2019. "The new digital divide is between people who opt out of algorithms and people who don't," *The Conversation*. <https://theconversation.com/the-new-digital-divide-is-between-people-who-opt-out-of-algorithms-and-people-who-dont-114719>

Tapsell, Ross. 2018. *Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital*. Serpong: Marjin Kiri.

Tarnoff, Ben. 21 Sep 2017. "Tech's push to teach coding isn't about kids' success - it's about cutting wages," *The Guardian*.

**Untuk memplesetkan
satu judul buku Paulo
Freire dan Daniel Macedo
(1987) tentang literasi:
literasi digital bukan hanya
membaca data, tapi juga
membaca dunia.**



Perempuan dalam Arus Perkembangan Teknologi Digital

Lamia Putri Damayanti

*Staf Komunikasi Combine
Resource Insitution*



Perempuan masih saja menjadi obyek, alih-alih subyek, dalam perkembangan teknologi. Dalam hal ini, perempuan menjadi salah satu kelompok paling rentan mendapat kekerasan berbasis siber. Oleh karena itu, pelibatan perempuan di ranah digital perlu diciptakan dengan memberikan ruang-ruang siber yang aman dan disertai penguatan literasi digital.

Handayati (32) baru saja membeli paket internet sebesar 3 *gigabyte* (GB) di Gala Cell, salah satu kios pulsa di Pelemsewu, Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta. Sembari mengasuh anaknya, ia menunggu penjaga kios mengisikan deret angka *voucher* ke ponselnya. Gala Cell adalah kios langganan Handayati tiap kali kuota internetnya habis. Sudah tak terhitung berapa kali ia membeli pulsa di kios tersebut. Handayati mengaku bahwa ia sama sekali tidak tahu cara mengisikan *voucher* kuota yang dibelinya. “Selama ini ya pokoknya diisikan oleh penjual. Saya terima beres,” ujarnya pada 10 Mei lalu.

Sewaktu membeli gawai, Handayati juga menyerahkan sepenuhnya pada kios tempat ia membeli gawai: mulai dari alamat surel (*e-mail*) untuk mengaktifkan Google Play Store, aplikasi yang terpasang di gawai, hingga pembuatan akun media sosial. “Jadi saya tinggal pakai saja, karena memang *gaptek*,” jelasnya.

Hal ini juga diakui oleh Tri, warga Desa Panggungharjo. Tri adalah salah satu peserta Lokakarya “Keamanan Digital untuk Kelompok Perempuan” yang diselenggarakan oleh Combine Resource Institution (CRI) pada Senin, 29 April 2019. Lokakarya tersebut merupakan agenda pertama



dari rangkaian acara Hari Ulang Tahun (HUT) CRI sekaligus sebagai salah satu upaya lembaga untuk terus mendorong kapasitas perempuan dalam menguasai teknologi digital. Sasaran utamanya adalah ibu rumah tangga yang tergabung dalam Perkumpulan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Lokakarya yang diikuti oleh 28 perempuan tersebut mayoritas berasal dari Bantul dan Sleman. Beberapa di antaranya merupakan perempuan penyandang disabilitas yang tergabung dalam Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Sleman.

Terdapat tiga hal penting yang dibagikan dalam lokakarya. Pertama, tentang pentingnya keamanan data pribadi, terutama di media sosial. Kedua, mengenai etika berbagi (*sharing culture*) di media sosial. Dan di bagian terakhir peserta dikenalkan dengan perkembangan aplikasi termutakhir agar dapat memahami persoalan di dunia maya terkini.

Saat mempraktikkan salah satu subtopik pelatihan, yakni bagaimana cara mengamankan data pribadi di media sosial, Tri kebingungan ketika hendak menghapus salah satu informasi personal di akun Facebook-nya. Facebook meminta kata sandi (*password*) dan alamat surel sebagai salah satu syarat untuk menghapus informasi pribadi tersebut. Jika *password* dan alamat surel tidak diberikan, maka penghapusan informasi tidak dapat dilakukan.

Masalahnya, Tri sendiri tidak mengetahui alamat surel yang ia gunakan untuk mendaftar Facebook dan lupa kata sandinya. Selama ini, akun Facebook Tri selalu terpasang di gawainya dan tak pernah keluar (*log out*). “Waktu itu dibuatkan sama penjualnya dan selama ini kalau ada masalah ya anak yang *ngurus*,” jelasnya.



Kasus yang sama juga dialami oleh Marsinem. Akun media sosialnya selalu terpasang di aplikasi dan tak pernah *log out*. Seperti Tri, Marsinem juga tidak mengingat *password* dan alamat surel yang dulu digunakan untuk mendaftar Facebook.

Mayoritas peserta memang menggunakan Facebook sebagai media sosial utama mereka. Namun, meski telah menggunakan Facebook selama bertahun-tahun, mereka mengaku tidak memahami betul fitur-fitur di dalamnya. “Saya *nggak* tahu kalau nomor *hape* saya ternyata selama ini bisa dilihat di akun Facebook. Selama ini, akun Facebook saya juga selalu terpasang di *hape*,” ujar Marsinem.

Facebook dengan kondisi akun yang selalu *log in* di gawai jelas memiliki risiko. Jika gawai tersebut hilang atau dicuri oleh orang lain, semua data—baik berupa foto, akun media sosial, kontak, dan lain sebagainya—dapat diakses dengan mudah. Lebih celaka lagi jika pemilik gawai tidak memiliki akses untuk mencadangkan datanya karena lupa atau tidak tahu alamat surel dan kata sandi. Padahal, semua data di dalam gawai dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Hal ini tentu akan merugikan korban.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa sejak awal sebagian perempuan telah kehilangan otoritasnya atas gawai yang digunakannya sehari-hari. Mereka tidak mengetahui betul bagaimana gawai tersebut bekerja. Terkadang, anak-anak mereka tidak mau repot dengan mengajari dan memberikan edukasi terkait literasi digital. “Asal bisa dipakai, ya sudah. Kalau ada masalah tinggal *dibenerin*. Biasanya kalau ada masalah juga hal-hal sepele,” jelas Khusna N. (23) yang mengatur semua pengaturan ponsel ibunya.

Sementara itu, Bagus N. (22) juga melakukan hal yang sama. Namun, karena jarang di rumah, ia memasrahkan hampir semua persoalan teknologi

“Rendahnya akses perempuan terhadap teknologi bisa dikatakan merupakan wujud penindasan struktural dan kultural yang dialami oleh mereka.”

yang tidak diketahui oleh ibunya kepada tetangga. “Kalau ibu saya paling sering *ngeluh* kalau ponselnya sering tidak ada suara dan lain-lain,” ujarnya. Namun demikian, Bagus belum pernah memberikan informasi mengenai keamanan atau literasi digital kepada ibunya meski ia sendiri mengetahui soal risiko tersebut.

Karlina Octaviany, dalam artikelnya yang berjudul “Para Ibu yang Terabaikan Dalam Pusaran Hoaks” menjelaskan bahwa kisah-kisah semacam itu menunjukkan bahwa proses sosialisasi menjadi terbalik ketika generasi muda memiliki pemahaman lebih tinggi dari generasi di atasnya. Dalam mendampingi anak berinternet, para ibu pun mengakui anak saat ini lebih pintar dalam penggunaan internet akibat terpaan yang terus-menerus. Menurutnya, kesenjangan literasi digital ini mengganggu rasa percaya diri ibu dalam menghadapi anak.

Fakta ini diperkuat oleh survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) yang mengungkapkan bahwa penetrasi internet terbesar adalah pada kelompok remaja usia 13-18 tahun, yakni sebesar 75,50 persen. Jumlah ini sangat jauh dibandingkan jumlah penetrasi internet pada orang tua usia 35-54 tahun yang hanya 44,06 persen. Sementara orang tua berusia di atas 54 hanya 15,72 persen saja yang terpapar oleh internet.

Sementara anak-anak terjun bebas menggunakan



teknologi tanpa pengawasan dan pemahaman mengenai seluk beluk dunia digital, para orang tua tidak bisa mengintervensi karena belum atau bahkan tak paham bagaimana cara menggunakannya. Pun demikian, persoalan yang diakibatkan dunia digital juga menghantui anak-anak dan remaja seperti pelanggaran privasi, perundungan siber, konten pornografi hingga paham radikalisme.

Rendahnya akses perempuan terhadap teknologi bisa dikatakan merupakan wujud penindasan struktural dan kultural yang dialami oleh mereka. Sejak awal kemunculan perkembangan teknologi, perempuan “dijauhkan” dari teknologi. Padahal, *programmer* pertama di dunia adalah perempuan, bernama Ada Lovalace. Pemisahan antara perempuan dan teknologi ini terus dirawat karena citra teknologi yang dianggap lebih maskulin. Keterlibatan perempuan dalam teknologi pun sangat minim. Hal ini kemudian menciptakan produk-produk teknologi yang seksis sebab tidak mengadopsi perspektif perempuan.

Secara kultural, yakni dalam budaya patriarki, perempuan juga selalu ditempatkan pada ruang-ruang domestik. Perempuan terjebak dalam pembagian kerja domestik-publik, sehingga menghambat mereka dalam mengakses hal-hal di luar urusan “sumur, dapur, kasur”. Dalam konteks perempuan sebagai ibu rumah tangga, mempelajari literasi digital atau berkenalan dengan teknologi digital barangkali hanya sebatas angan, sebab waktu dan tenaga telah tersedot untuk beban domestik, terutama di dalam keluarga, maupun di ruang publik.

Salah satu peserta lokakarya, Utin Ririn Anggraeni mengaku bahwa sebagai ibu rumah tangga, informasi mengenai literasi digital memang sangat minim diterima. “Kalau pun ada, materi

seperti itu sangat sulit dipahami,” ujarnya. Bahkan pada saat pelatihan, banyak peserta yang merasa bahwa waktu pelaksanaan lokakarya tidak pas karena mereka harus mengantar anak ke sekolah, berbelanja ke pasar dan lain hal sebagainya.

Hal-hal yang disebutkan di atas baru sedikit contoh penggunaan gawai. Belum lagi persoalan lain seperti keamanan berinternet dan pelanggaran data pribadi yang kian marak. Survei Kaspersky Lab dan B2B International menyebutkan bahwa perempuan lebih berisiko kehilangan data pribadi di perangkat *mobile* dibanding pria. Kaspersky Lab juga menyebut bahwa meski lebih dari seperempat perempuan merasa khawatir tentang keamanan daring foto-foto di ponselnya, pada kenyataannya masih banyak yang belum menerapkan langkah-langkah keamanan yang paling dasar sekali pun. Banyak juga perempuan yang masih belum memahami seberapa rentannya mereka terhadap serangan siber. Hanya 19 persen yang percaya bahwa mereka bisa menjadi target, dibandingkan laki-laki sebanyak 27 persen.

Minimnya kesadaran tersebut membuat perempuan merasa tidak perlu melakukan langkah-langkah keamanan untuk melindungi foto-foto berharga atau data pribadi yang tersimpan di perangkat selulernya. Selain itu, sebanyak 19 persen perempuan mengakui bahwa mereka tidak melindungi perangkat *mobile* dengan kata sandi, dan 14 persen perempuan tidak menggunakan segala bentuk solusi keamanan sama sekali

Kekerasan siber terhadap perempuan juga semakin sering terjadi. Dari 31 pemberitaan media yang ditelusuri, Komisi Nasional Perempuan mencatat 55 persen berita daring dan media cetak merupakan kasus terkait *revenge porn*. Berdasarkan



Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilakukan Komnas Perempuan pada tahun 2018, menyebutkan bahwa presentase kedua tertinggi adalah *malicious distribution* dengan presentase 23 persen. Ketiga tertinggi adalah *cyber harrasment* atau *bullying* atau *spamming* dengan presentase 19 persen.

Cyber harrasment merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan pengiriman teks secara terus menerus dengan memanfaatkan teknologi, baik internet, ponsel, ataupun perangkat lain, yang dimaksudkan untuk menyakiti, mengganggu, menakut-nakuti ataupun mengancam seseorang. Sedangkan *malicious distribution* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban dengan ancaman penyebaran foto atau video pribadi korban. Sementara itu *revenge porn* adalah bentuk khusus dari '*malicious distribution*', yang dilakukan dengan motif balas dendam, dengan cara mengeksploitasi dan mengekspos konten-konten pornografi korban. Tentu saja, penyebaran konten pornografi tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban.

Dilansir dari Tirto.id, Dyhta Caturani, aktivis hak asasi manusia dan pejuang kesetaraan gender mengatakan, hingga kini kekerasan terhadap perempuan di internet masih belum diperhatikan. Beberapa menganggap kekerasan verbal atau tulisan daring (*online*) sebagai candaan atau sesuatu yang wajar. Padahal menurut Dyhta, kekerasan tersebut tidak sekedar kekerasan *online* atau kekerasan dunia maya atau siber, melainkan merupakan perpanjangan dari kekerasan yang sudah ada di kehidupan nyata (*offline*).

Lebih lanjut, Dhyta menjelaskan bahwa perempuan kerap direndahkan dengan disertai atribut seksual atau referensi lain dengan tujuan menghina. Penyerangan terhadap laki-laki di internet lebih merujuk pada ide atau pernyataannya. Sementara perempuan diserang dengan cara yang berbeda, yakni dengan menyerang tubuh atau urusan personal lainnya. Dalam hal ini, menurut Amnesty International kekerasan terhadap perempuan di internet juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Melihat beragam ancaman bagi perempuan di internet, literasi digital bagi kelompok ini merupakan sesuatu yang wajib digalakkan. Dalam hal ini, literasi perlu dilakukan sejak dari akar penggunaan teknologi, sehingga perempuan mengetahui betul bagaimana cara kerja teknologi yang ada di genggamannya.

Adapun literasi digital seharusnya tidak hanya dipahami sebagai bagian dari literasi media. Literasi digital tidak terbatas pada proses konsumsi atau memahami informasi dari medium digital/elektronik semata. Agie Nugroho Sugino dalam esainya yang berjudul “Tiga Aspek Literasi digital: Mengapa Ponsel Membuat Anda Sulit Fokus” menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek kritis lain yang perlu diketahui dalam literasi digital, yakni kesadaran data (*data awareness*), kemampuan analisis data, dan kemampuan untuk fokus (*deep work*). Ketiga aspek ini tidak hanya berbicara mengenai kemampuan kritis seseorang dalam mengonsumsi dan memproduksi informasi di internet, tetapi juga memahami penggunaan piranti teknologi digital, privasi data dan keamanan dalam dunia digital. Untuk mencapai akses kebermaknaan dalam literasi digital, ada enam unsur yang harus



dipenuhi, yaitu: keamanan berinternet; komunikasi efektif; memilah informasi; kolaborasi; pemaknaan budaya dan sosial; serta kreativitas.

Dilansir *Kominfo.go.id*, Asisten Deputi Infrastruktur dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ratna Susianawati menilai, perempuan memiliki potensi besar berperan dalam dunia digital. Mereka telah menjadi pengguna internet, baik sebagai pihak yang mengonsumsi maupun memproduksi data atau konten di internet. Perempuan juga telah berkontribusi dalam kehidupan ekonomi, budaya, dan sosial dalam dunia digital. Namun, hal ini menjadi tantangan baru. Perempuan harus memperkuat kapasitasnya dalam bidang ini karena aktivitasnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk juga untuk keluarganya atau orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan di dunia digital perlu diakomodasi dengan menciptakan ruang-ruang siber yang aman dan disertai dengan penguatan literasi digital.





Media Sosial dan Privasi

Idha Saraswati

*Mahasiswa pascasarjana
Ilmu Religi dan Budaya (IRB)
Universitas Sanata Dharma*





Ketika memutuskan untuk mulai membatasi aktivitas di media sosial, saya justru semakin sering menerima permintaan pertemanan dari kerabat, baik dari garis keluarga terdekat sampai terjauh yang bahkan belum pernah bertemu secara fisik. Meskipun tampaknya sepele, permintaan pertemanan semacam itu menimbulkan dilema. Kalau diterima saya harus siap merespons percakapan keluarga. Kalau tidak diterima, bisa-bisa saya dikira sombong karena tidak mau berteman dengan kerabat.

Entah mengapa, kebanyakan permintaan pertemanan itu berasal dari kerabat perempuan dengan usia sebaya atau yang lebih dewasa dari saya. Mereka baru mengajukan permintaan pertemanan di media sosial seperti Instagram ataupun Facebook barangkali karena baru menemukan akun medsos saya. Kemungkinan lainnya, mereka baru mulai aktif menggunakan medsos akhir-akhir ini. Faktor kedua ini sangat mungkin karena para kerabat yang tinggal di desa baru mulai bergabung dengan medsos setelah sambungan internet yang lancar sampai ke sana beberapa tahun belakangan. Setelah internet lancar pun, mereka perlu waktu hingga akhirnya bisa punya telepon seluler dan membuka akun medsos sendiri. Ini potret umum

karena di Indonesia perempuan secara umum memang tertinggal dalam menggunakan internet dibanding laki-laki.

Tentu saja saya menyetujui semua permintaan pertemanan semacam itu. Tak lama kemudian saya ditandai dalam sejumlah foto keluarga. Selain itu, saya juga menerima pesan di Messenger yang isinya menanyakan kabar, jumlah anak, domisili, pekerjaan, dan ada juga meminta nomor ponsel. Kadang-kadang pertanyaan semacam itu ditanyakan langsung dalam kolom komentar unggahan status saya. Jadi antara status dengan komentarnya tidak *nyambung*.

Saya paham bahwa semua pesan dan komentar itu didasari niat baik, yakni menjaga silaturahmi keluarga yang sekarang terpencar-pencar. Medsos seperti Facebook memang menjadi platform yang mempertemukan banyak kerabat dan teman yang telah lama berpisah. Saya pun telah merasakan manfaat tersebut.

Meskipun demikian, ramah tamah di medsos itu kini terasa agak mengganggu karena saya mulai ingin membatasi hal-hal yang personal di medsos. Salah satu alasan saya melakukan hal itu adalah untuk menjaga privasi. Tetapi apa sih perlunya orang seperti saya ini menjaga privasi, kok macam artis saja?

Masih ingat kasus video Bu Dendy yang viral pada awal 2018 lalu? Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah diunggah di akun Facebook Bu Dendy, video yang menampilkan konflik antara Bu Dendy dan Mbak Nylla itu dibagikan ulang oleh netizen sehingga menyebar lintas platform. Tak hanya video, data-data pribadi kedua perempuan itu juga menyebar di internet. Identitas dua sosok perempuan dari sebuah desa di Jawa Timur yang sebelumnya tak dikenal itu diakses dan disebar



oleh banyak pihak. Nama lengkap, tanggal lahir, alamat, status perkawinan, wajah anak, pekerjaan, jumlah penghasilan, relasi keluarga hingga aktivitas sehari-hari keduanya tiba-tiba diketahui oleh banyak orang. Mbak Nylla yang dalam video itu digambarkan sebagai si penjahat pun dirundung netizen. Keluarganya mendapat imbas serupa. Bu Dendy telah menghapus video tersebut dari akun Facebooknya. Namun, video tersebut kadang menyebar di platform lain sehingga tetap bisa diakses siapa saja sampai sekarang.

Data-data pribadi dua perempuan itu bisa dengan mudah diakses karena mereka kerap membagikan datanya di medsos. Membagikan informasi personal di medsos sama saja dengan membuka pintu dan jendela rumah untuk semua orang yang lewat. Iya kalau orang itu hanya melihat isi rumah. Bagaimana kalau kemudian ada yang iseng sehingga setelah melihat juga ingin mengambil isinya?

Itulah persisnya yang terjadi dalam kasus video Bu Dendy. Sebelum ada video yang viral, data yang mereka unggah di medsos masing-masing tampak tidak penting. Namun begitu videonya viral, seketika itu juga medsos mereka dibanjiri pengunjung yang tidak hanya ingin melihat video namun juga mengakses data-data di dalamnya. Dalam kasus ini, dampak terburuknya adalah rasa trauma Mbak Nylla karena dirundung. Di kasus lain, pelanggaran privasi semacam itu bisa berdampak pada kerugian materi, kehilangan nama baik, hingga kekerasan fisik dan mental yang bisa berujung kematian.

Sama dengan situasi di ranah luring, perempuan lebih rentan mendapat ancaman yang berhubungan dengan pelanggaran privasi semacam itu. Istilahnya

disebut sebagai kekerasan berbasis gender online atau KGBO. Bentuknya bisa berupa pelecehan online, ancaman menyebarkan foto/video pribadi, peretasan akun medsos, hingga penyebaran data pribadi. Anak-anak juga menghadapi kerentanan yang sama, khususnya terkait dengan keberadaan predator online. Tingkat kerentanan terhadap ancaman kekerasan online semacam itu sangat berkaitan dengan kebiasaan dalam membagikan data maupun informasi di internet, khususnya media sosial.

Di medsos, kegemaran untuk membagikan data dan informasi pribadi kerap disebut sebagai tindakan partisipatif. Istilah partisipatif muncul karena pengguna medsos sukarela membagikan datanya untuk bersosialisasi. Namun, Mark Andrejevic mengingatkan bahwa pengguna medsos sebenarnya tidak partisipatif karena umumnya tidak menyadari bahwa proses berbagi data itu tidak hanya melibatkan pengguna medsos. Di situ juga ada platform pengumpul data yang bisa leluasa mengakses segala data aktivitas kita. Pengumpulan data semacam itu dilakukan untuk menganalisis kebiasaan kita sehingga dari situ bisa ditentukan misalnya tema apa yang kita sukai, iklan apa yang cocok untuk kita dan sebagainya. Selanjutnya, akun medsos kita akan diatur supaya fokus mengakses tema dan iklan yang kita sukai saja. Jadi selain privasi kita dilanggar, kita juga ditenggelamkan dalam dunia berisi hal-hal yang kita sukai saja, yang oleh Eli Pariser disebut sebagai gelembung saringan. Akibatnya, kita hanya mendapat banyak informasi yang sejenis sehingga wawasan kita menyempit.

Dengan demikian, bukan hanya netizen iseng yang mengincar data-data kita, namun juga platform medsos yang kita gunakan. Ini membuktikan bahwa



“Ini membuktikan bahwa tidak harus menjadi artis untuk menjaga privasi. Kita semua memiliki kerentanan yang sama.”

tidak harus menjadi artis untuk menjaga privasi. Kita semua memiliki kerentanan yang sama.

Medsos, seperti namanya, hanyalah salah satu pilihan media yang bisa kita gunakan. Artinya, medsos bukanlah diri kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu menjadikan medsos sebagai representasi diri sehingga harus membagikan segala data, opini dan aktivitas pribadi kita di dalamnya.



Bukuntukpapua: Sekrup Kecil Roda Literasi Papua

Herman Degei

*Relawan Bukuntukpapua.
Tinggal di Yogyakarta*



Bukuntukpapua (BUP) mulai berdiri pada tahun 2012. Saat itu, Longginus Pekei, salah seorang guru pengajar di Nabire, Papua, yang berinisiatif mendirikan ruang baca tetapi tidak punya buku-buku bacaan. Sebagai modal awal, ia menghubungi Dayu Rifanto, teman lamanya ketika dulu sama-sama kuliah di Yogyakarta untuk bantu menggalang donasi buku. Dayu Rifanto yang tinggal di Yogyakarta, yang saat itu sedang berkulat dengan tesis gelar masternya di Universitas Diponegoro, Semarang, menanggapi permintaan dari temannya itu.

Dayu pun mulai membantu menggalang buku dengan menghubungi teman-temannya, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Melihat internet sebagai sarana yang relevan untuk melakukan aksi sosial seperti menggalang donasi buku, Dayu pun mulai mempelajari metode penggalangan buku lewat internet secara otodidak. Ia menyelami pelbagai akun media sosial dari komunitas-komunitas penggiat pendidikan dan literasi seperti Indonesia Bercerita, Indonesia Mengajar, Taman Baca Pelangi Nila Tanzil, Akademi Berbagi, dan lain-lain. Ia juga mengajak kawan-kawan lainnya untuk sama-sama bergerak.

Sekitar bulan Oktober 2012, Dayu dan kawan-kawannya mulai berdiskusi dan membuat akun twitter @bukuntukpapua. Setelah akun media sosial tersebut dibuat cukup banyak orang yang tergerak membantu. Salah satu rumah baca di Kota Depok, Jawa Barat, Rumah Baca Panter, bersedia mendonasikan sekitar 500 buku. Pada bulan Desember 2012, BUP melakukan pengiriman perdana sekitar 1000 buku ke Nabire dengan kapal laut. Ongkos pengirimannya ketika itu, sekitar Rp 1,5-2 juta. Dayu membayar seluruh biaya pengirimannya menggunakan uang pribadinya.

Sejaksaat itu, semakin banyak orang yang tertarik untuk mendonasikan bukunya, bahkan bersedia menjadi relawan untuk BUP. BUP pernah punya 15 komunitas di berbagai kota di Indonesia. Relawan ramai dan berbagai kegiatan penggalangan buku tak henti-hentinya diadakan. “Dulu BUP bergerak dengan membuka komunitas di berbagai kota di mana ada relawan (yang) mau bikin komunitas jejaring BUP,” kata Dayu dalam sebuah wawancara bersama awak media *Telusuri.id*. Apalagi dengan adanya program *Free Cargo Literacy* setiap tanggal 17 tiap bulan dari PT. Pos Indonesia, semangat itu semakin menggebu.

Meskipun begitu, semakin ke sini, gairah berkomunitas dari para relawan semakin surut sehingga jejaring komunitas Bukuntukpapua tidak lagi sebanyak dahulu. Orang-orang yang tergabung dalam komunitas jejaring BUP mulai meninggalkan BUP dengan berbagai alasan. Mulai dari karena tamat kuliah dan memilih bekerja atau pulang ke daerah. Selain itu, beberapa orang juga lebih memilih melanjutkan studi ke luar negeri, dan seterusnya. Kini gelang donasi dilakukan sendiri



secara terpusat oleh BUP, bekerjasama dengan kawan-kawan yang satu ide. Sekitar delapan bulan terakhir ini, misalnya, BUP berkolaborasi dengan Rumah Kata Sorong untuk mengampanyekan penggalangan donasi buku.

Selama ini, selain menggalang donasi buku, BUP juga bantu mendaftarkan beberapa Taman Bacaan Masyarakat (TBM) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar dapat melakukan pengiriman buku gratis melalui program Free Cargo Literacy (FCL) dan menghubungkan mereka (para pengelola taman bacaan) dengan donator buku. BUP yang kini berpusat di Sorong, Papua Barat, hingga sekarang giat melakukan kampanye literasi melalui media sosial seperti Facebook (Bukuntukpapua), instagram (@bukuntukpapua) dan twitter (PapuaCerdas).

Sampai sekarang, sudah ada lebih dari 40 rumah baca yang pernah digalangkan donasi bukunya oleh BUP. Selain rumah baca komunitas, BUP juga menyalurkan donasi buku bacaan ke titik-titik literasi lain, seperti perpustakaan sekolah, perpustakaan komunitas, TBM (Taman Baca Masyarakat), dan lain-lain. BUP bahkan punya penerbitan sendiri yang diberi nama Papua Cendekia dan sampai sekarang telah menerbitkan 12 buku.

Ke depannya penerbit ini diharapkan dapat menjadi salah satu tiang yang menopang gerakan BUP sekaligus mengakselerasi perkembangan literasi di Papua dengan menjadi wadah penulisan buku terutama bacaan anak agar anak-anak di Papua bisa membaca karya-karya penulis dan calon penulis Papua sendiri.

Sampai sekarang, BUP terbuka bagi siapapun yang berminat menjadi relawan. Hanya saja, proses perekrutan anggota lumayan ketat. Sebab aktivitas di BUP bukan hanya galang donasi buku, tetapi

sekaligus mengkampanyekan literasi di Papua, sehingga ada kerja-kerja menulis konten yang perlu dikuasai oleh relawan. BUP cenderung mencari orang-orang yang bersedia menjadi relawan dalam jangka panjang.

* * *

Nama saya Herman Degei, mahasiswa Papua di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Saya mulai bergabung dengan Bukuntukpapua (BUP) pada bulan Oktober 2017. Semenjak bergabung hingga sekarang, saya kadang membantu pekerjaan-pekerjaan dari BUP (seperti mewawancarai beberapa narasumber, merapikan naskah hasil diskusi bulanan dari BUP) dan lebih sering menggalang donasi buku di Yogyakarta. Saya juga mengajak beberapa teman yang mau diajak kerja sama menggalang donasi buku maupun menggalang donasi kertas bekas yang biasanya kami jual dan hasilnya dipakai untuk membeli buku-buku bacaan dan dikirim ke Papua.

Galang Donasi Buku

“Sebab aktivitas di BUP bukan hanya galang donasi buku, tetapi sekaligus mengkampanyekan literasi di Papua,”



Biasanya tiap bulan atau dua bulan sekali, BUP menggalang donasi buku untuk TBM di Papua. Misalnya pada Mei ini, BUP menggalang donasi buku untuk Ruang Baca Ayago di Paniai, Papua, bulan berikutnya menggalang donasi buku lagi untuk TBM Eme Moe di Sorong, Papua Barat. Di Yogyakarta kami menunggu instruksi penggalangan donasi buku dari BUP pusat, dan mulai meneruskan (membagikan) informasinya lewat media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Kami memanfaatkan media sosial untuk kerja sosial ini, dan selama ini dapat dikatakan cukup efektif.

Biasanya kami juga membagikan poster penggalangan donasi buku ke grup-grup WhatsApp seperti grup himpunan mahasiswa jurusan (HMJ) atau unit kegiatan mahasiswa (UKM) dari kampus, beberapa komunitas lain yang kebetulan di situ kami juga termasuk anggota di dalamnya, dan kepada teman atau kenalan secara personal. Dan selama ini tidak sedikit orang yang ikut mendonasikan bukunya. Kadang mereka antar ke kami, kadang juga kami yang mengambil di tempat mereka dan kemudian dikumpulkan di satu tempat. Buku-buku yang dikumpulkan, kami kemas dan kirim tiap bulan lewat jalur pengiriman buku gratis.

Jenis buku yang kami galang sesuai dengan yang dibutuhkan dari Taman Bacaan di Papua. Selama ini jenis atau genre buku yang paling sering kami galang adalah buku-buku cerita bergambar anak,

buku ensiklopedia dunia anak, buku komik, buku pengembangan diri, buku cerita anak bilingual, buku fiksi seperti cerpen, roman, novel, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan kadang buku-buku ekonomi, sosial, budaya, politik. Tergantung permintaan oleh taman bacaan masyarakat di Papua.

Kumpulkan Kertas Bekas

Kami juga melihat di Yogyakarta banyak mahasiswa yang kerap menyimpan sampah kertas bekas (kertas HVS). Entah itu kertas-kertas yang dari tugas kampus seperti makalah, lembar-lembar kertas dari revisi skripsi, kertas buram atau kertas koran. Kami juga menerima buku-buku yang sudah tidak dipakai atau digunakan lagi. Kami berpikir daripada kertas-kertas bekas itu ditinggal begitu saja tanpa didaur ulang atau dijual, mengapa tidak, kertas-kertas tersebut kami manfaatkan untuk dijual dan uangnya dipakai untuk kepentingan sosial.

Semua kertas yang terkumpul biasanya kami jual di tempat loak. Hasil penjualan kertas tersebut kami pakai untuk membeli buku-buku yang dibutuhkan oleh TBM di Papua. Di Yogyakarta kami sudah punya langganan yang biasanya membeli barang-barang bekas termasuk limbah kertas. Pada bulan ini Mei 2019, kami menjual kertas bekas yang beratnya mencapai 47 kg. Uang hasil penjualan kertas bekas tersebut akan kami pakai untuk membeli buku, lalu digabung dengan beberapa buku yang tersisa, kami mengirimnya ke salah satu TBM di Biak, Papua yaitu Taman Baca Perahu Pustaka Kumep dan beberapa TBM lainnya.



Ajukan Proposal Bantuan Buku ke Beberapa Penerbit

Pada bulan Maret 2019, kami juga membuat proposal bantuan buku ke beberapa penerbit di Yogyakarta seperti Penerbit Galangpress, Penerbit & Percetakan Andi Offset, dan Penerbit Kanisius. Ketiga penerbit tersebut menyambut baik proposal yang kami ajukan, dan memberikan bantuan berupa buku. Buku-buku tersebut kemudian kami kirim secara berkala mulai Juni 2019 ke beberapa titik ruang baca, di baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat.

Ke depannya, kami juga berencana mengajukan proposal bantuan buku ke beberapa penerbit dan toko buku lainnya di Yogyakarta. Tetapi dengan begitu, tidak berarti kami berhenti menggalang donasi buku dan kumpulkan kertas bekas. Jadi, menggalang donasi buku, mengumpulkankertas bekas, mengajukan proposal bantuan buku ke beberapa penerbit dan toko buku, dapat dilakukan bersamaan.. Sembari itu, kami juga membuka diri, bercerita tentang perkembangan literasi di Papua dan berjejaring dengan orang atau pihak lain yang punya atensi terhadap dunia literasi.



18 TAHUN BERSAMA WARGA

Tahun 2019 Combine Resource Institution (CRI) telah menginjak usia 18 tahun. Delapan belas tahun bukan waktu yang pendek bagi eksistensi sebuah organisasi sosial. Sebuah refleksi tentu sangat diperlukan sebagai pengingat bagi kami dan pertanggungjawaban kepada publik atas kerja-kerja yang selama ini telah dilakukan.

Untuk menandai capaian tersebut dan menghargai usaha setiap elemen warga yang pernah bekerja bersama, maka kami hendak mengadakan serangkaian kegiatan demi terus menjaga semangat transformasi ini.





Berdaya dengan Data melalui Pemanfaatan SID Berdaya

Kebutuhan terhadap data yang tepat dan akurat menjadi hal yang substansial dalam pembangunan desa dan pemberdayaan warga. Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya menjadi salah satu cara untuk memaksimalkan potensi desa melalui data.

Hal itu dirasakan oleh Jainu, Perangkat Desa Balerante, Klaten, saat terjadi bencana erupsi Merapi. “Saat itu, kami membutuhkan database yang lengkap. Tetapi, setiap kali data itu sudah dikumpulkan (dalam bentuk kertas), selalu saja hilang. Entah karena dipinjam dan tidak dikembalikan atau rusak,” jelasnya pada diskusi ‘Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya, Cuma Proyek Sesaat atau Sungguh Bermanfaat?’ pada Kamis, 2 Mei 2019.

Pada saat itulah, ia mulai berkenalan dengan SID untuk pertama kalinya. Dengan semangat membangun database untuk situasi bencana, khususnya erupsi Merapi, Jainu mempelajari konsep SID. “Perkenalan dengan SID pertama kali diawali dengan kesulitan pendataan penduduk pascabencana erupsi Merapi pada tahun 2006,” katanya.

Dalam situasi bencana, data yang akurat memang menjadi hal penting untuk distribusi

bantuan. Apalagi Desa Balerante adalah salah satu wilayah yang rawan terkena imbas langsung dari aktivitas Merapi. Oleh karena itu, membangun database menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Melalui SID, database ini mulai terwujud. Pelan-pelan, Jainu dan timnya mampu mewujudkan set data untuk mitigasi bencana yang dapat dimanfaatkan jika sewaktu-waktu Merapi kembali mengalami erupsi.

Sementara itu, Fatimah Nurhayati, Perangkat Desa Murtigading, Bantul mengakui manfaat besar dari pengumpulan dan pengolahan data berdasarkan SID Berdaya, terutama dalam memetakan potensi desa. “Awalnya kami tidak tahu sama sekali potensi apa yang ada di desa ini karena kami tidak memiliki data. Adapun desa kami bukan desa wisata. Tetapi, melalui SID kami jadi mengetahui bahwa potensi desa kami adalah UMKM,” jelasnya.

Adanya data yang akurat membantu Nurhayati dan kawan-kawannya dalam memetakan potensi-potensi desa. Dalam hal ini, pembacaan terhadap data membantu mereka mengambil keputusan. Misalnya saja ketika Desa Murtigading didaulat memiliki potensi UMKM yang cukup besar. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah Desa Murtigading mulai memberikan pelatihan bagi tiap-tiap pedukuhan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam berwirausaha. “Salah satu produk dari UMKM desa kami yang terkenal adalah kue adrem,” jelasnya.



Salah satu prinsip SID Berdaya adalah bersifat inklusif. Dalam hal ini, seluruh proses pendataan harus merepresentasikan apa yang dibutuhkan oleh warga. “Misalnya saja ada warga desa penyandang disabilitas. Mereka juga harus diberi ruang. Dengan kata lain, SID harus mampu mengakomodasi berbagai pihak. Tetapi dengan catatan bahwa semua pendataan yang dilakukan dapat dibaca dengan jelas,” ujar Elanto Wijoyono, Manajer Unit Pengelolaan Sumber Daya Komunitas (UPSDK) CRI.

Lamia Putri Damayanti

Kelola Sampah Rumah Tangga Bisa Jadi Alternatif Kendalikan Timbunan Sampah

Di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), tidak semua sampah dapat didaur ulang. Sebab, tidak banyak pabrik atau perusahaan yang mau menerima sampah yang mereka produksi untuk diolah kembali menjadi produk baru. Hal itu dipaparkan oleh Nur Thamrin, pekerja sampah asal Sorogenen, Sewon, Bantul dalam diskusi 'Sampahmu Rejekiku (?)' yang merupakan gelaran perdana dari diskusi "Suka Duka di Tanah Jogja" pada Jumat, 3 Mei 2019.

"Banyak plastik yang berakhir jadi sampah saja karena bijih plastiknya sudah tidak dapat didaur ulang," jelas pria yang akrab disapa Kang Thamrin di Limasan Griya Jagadhaya, Sewon, Bantul.

Hal tersebut terjadi karena sejak awal, pabrik yang memproduksi plastik tidak terlalu peduli apakah produknya dapat didaur ulang kembali atau tidak. Selain plastik, sampah elektronik juga merupakan persoalan yang mendesak untuk diatasi. Cahyo Ramadhani, salah satu peserta diskusi menceritakan kegelisahannya dalam mengelola sampah elektronik. "Selama ini saya masih kebingungan dalam mengelola sampah-sampah elektronik. Misalnya saja baterai bekas," jelas Cahyo. Menanggapi hal tersebut, Kang



Thamrin menyarankan untuk mengelola sampah yang dapat didaur ulang untuk dijual ke penadah.

Sehari-hari, Kang Thamrin memang bekerja dengan mencari nafkah lewat TPS. Ia dan kawan-kawannya mengelola dan mengolah sampah yang masih berharga untuk dijual kembali. “Misalnya sampah plastik atau besi yang masih dapat didaur ulang, akan saya jual kembali ke pabrik,” jelasnya

Persoalan sampah memang menjadi masalah yang cukup pelik. Apalagi, sehari-hari, manusia manusia tak pernah luput dari menghasilkan sampah, baik berasal dari rumah tangga maupun industri. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DI Yogyakarta, setidaknya terdapat 2.320 ton sampah yang menumpuk di sejumlah TPS sementara pada 24 hingga 27 Maret 2019. Hal tersebut terjadi karena sampah tidak dapat diangkut ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta karena telah melebihi kapasitas.

Akibat meningkatnya jumlah sampah yang tak terkendali, Warga Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Bantul menutup akses menuju TPST Piyungan, Bantul pada Maret lalu. Polusi udara dan lingkungan akibat tumpukan sampah membuat kenyamanan dan kesehatan warga terganggu.

Menanggapi masalah tersebut, Kang Thamrin menjelaskan bahwa pengelolaan sampah sebetulnya dapat dimulai dari rumah tangga masing-masing. Meski menjadikan TPS sebagai ladang mata pencahariannya, Kang Thamrin mengaku tidak pernah membuang sampah di TPS. “Kalau di desa ada yang namanya *joglangan*, yakni tanah yang dikeruk untuk menampung sampah. Saya mengelola sampah rumah tangga dengan *joglangan* tersebut,” jelasnya. Melalui cara tersebut, Kang Thamrin mengelola semua sampah yang dihasilkannya sendiri tanpa membuangnya ke TPS.

Persoalannya, tidak semua orang memiliki lahan sisa di rumahnya. Merry Prestiningsih, salah satu peserta menjelaskan kondisinya yang tinggal di perumahan. “Kalau di perumahan kan memang minim lahan, jadi tidak bisa membuat *joglangan*,” katanya.

Ketiadaan lahan dapat disiasati dengan manajemen pengelolaan sampah. Meski tidak mengurus sampahnya sendiri, setidaknya tiap-tiap keluarga mengelola sampah rumah tangga dengan bijak sehingga mengurangi penumpukan sampah di TPS maupun TPST. “Jadi pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan pemilahan. Sampah organik dikumpulkan jadi satu. Sementara itu sampah yang dapat didaur ulang dikelompokkan sendiri dan lain sebagainya,” jelas Kang Thamrin



Salah satu peserta lainnya mengkhawatirkan sumbangan sampah dari indekos yang jumlahnya cukup banyak. “Saya berharap anak-anak kos dan pemilik indekos menangani sampah dengan memilahnya atau membuat aturan tersendiri terkait dengan pengelolaan sampah,” jelasnya.

Lamia Putri Damayanti

Pengetahuan Terbuka Beri Peluang yang Sama Bagi Warga

Gagasan mengenai pengetahuan terbuka menawarkan pengetahuan yang transparan, dapat diakses secara bebas, tersebar luas, dan dikembangkan bersama melalui jaringan kolaboratif. Gagasan ini menjadi penting karena yang ditawarkan tidak hanya pengetahuan tetapi juga akses yang terbuka lebar bagi siapa saja. Dalam hal ini, pengetahuan terbuka mendorong siapapun agar dapat mengakses informasi dan ilmu pengetahuan.

Salah satu cita-cita dari gagasan pengetahuan terbuka adalah mengurangi ketimpangan informasi dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada semua pihak secara cuma-cuma. Komunitas Wikimedia Indonesia adalah salah satu yang



berupaya mewujudkan hal tersebut dengan membuka ruang kolaborasi di internet bernama Wikipedia, terutama Wikipedia Indonesia.

“Melalui platform tersebut, semua pihak dapat berkontribusi untuk berbagi pengetahuan,” jelas Cahyo Ramadhani, pegiat Wikimedia Indonesia, dalam diskusi “Pengetahuan Terbuka, Membuka Pengetahuan”, di Limasan Griya Jagadhaya, Sewon, Bantul pada Selasa, 30 April 2019.

Kolaborasi tersebut tidak hanya dilakukan dengan berbagi pengetahuan atau informasi tetapi juga mengkomodasi pengetahuan ke dalam berbagai bahasa. Cahyo menjelaskan bahwa keberagaman bahasa daerah di Indonesia dapat



diakomodir sebagai medium untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada seluruh lapisan masyarakat. Misalnya saja dengan menerjemahkan beberapa konten sains dan teknologi di Wikipedia ke dalam Bahasa Jawa dan Bahasa Bali. “Hal ini dilakukan agar bahasa daerah yang kita gunakan sehari-hari sebetulnya dapat mengakomodasi ilmu pengetahuan. Sehingga pengetahuan tersebut terasa familiar oleh semua pihak karena adanya pendekatan bahasa,” ujar Cahyo.

Ketika Wikimedia Indonesia berbicara mengenai penyebaran informasi berbasis teks, Komunitas Gimpscape menawarkan kolaborasi pengetahuan berbasis grafis atau gambar. “Gimpscape menyediakan ruang berbagi gambar yang dapat diakses oleh siapapun karena hak ciptanya telah dibuka untuk publik. Sehingga, gambar tersebut dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak,” jelas Rania Amina, pegiat Komunitas Gimpscape

Namun sebenarnya pengetahuan terbuka tidak terbatas pada lingkup yang disebut di awal. Jika merujuk pada definisi sederhananya, “pengetahuan terbuka merupakan pengetahuan yang dapat digunakan, didaur ulang, dan didistribusikan secara bebas, tanpahambatan hukum, sosial dan teknologi,” maka sesungguhnya praktik pengetahuan terbuka sudah berlangsung sejak lama di Nusantara. Di desa-desa, praktik pengetahuan terbuka dilakukan dengan membagikan pengetahuan dari satu orang ke orang lain tanpa syarat apapun. Sebagai contoh praktik berbagi resep di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Satini, salah satu warga desa yang merupakan pengrajin penganan tradisional bernama adrem, tak segan membagikan pengetahuannya membuat adrem yang enak kepada warga lainnya. Begitulah

pengetahuan terbuka dipraktikkan dalam format yang paling sederhana.

Satini tidak pernah terpikir bila menyebarkan resep tersebut dapat menghambat rejekinya. Menurutnya, justru dengan membagikan resep tersebut, semua orang di desanya dapat membuat adrem. “Ketika pesanan adrem membludak dan saya tidak dapat membuat semuanya, warga desa lain yang dapat membuat bisa mengambil alih pesanan tersebut,” pungkasnya. Berawal dari segelintir orang, kini desa tersebut dikenal sebagai desa pengrajin adrem dengan kualitas yang tak diragukan.

Bagi CRI sendiri, pengetahuan terbuka merupakan marwah organisasi, sebab semangat pengetahuan terbuka adalah semangat yang menjadi embrio organisasi. Dalam aktivitasnya, pengetahuan terbuka menjadi landasan utama, seperti kegiatan media komunitas dan jurnalisme warga, atau Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya. Selain itu, sejak tahun 2008, CRI turut mengampanyekan penggunaan Linux, sistem operasi komputer berbasis pengetahuan dan sumber terbuka, kepada jejaring eksternal maupun internal. Hingga saat ini, Linux menjadi pendukung utama kerja-kerja komputasi organisasi.

Lamia Putri Damayanti



Perempuan Berdaya Lindungi Diri di Media Sosial

Sudah banyak hasil riset yang mengungkapkan bahwa perempuan merupakan pihak yang paling rentan mengalami kejahatan siber atau kekerasan di dunia maya. Salah satunya adalah survei yang dilakukan oleh Kaspersky Lab dan B2B International, yang mengungkapkan bahwa perempuan lebih berisiko kehilangan data pribadi di perangkat mobile dibanding pria.

Kaspersky Lab juga menyebut bahwa meski lebih dari seperempat perempuan merasa khawatir tentang keamanan daring foto-foto di ponselnya, pada kenyataannya masih banyak yang belum menerapkan langkah-langkah keamanan yang paling dasar sekalipun. Banyak juga perempuan yang masih belum memahami seberapa rentannya mereka terhadap serangan siber. Hanya 19 persen yang percaya bahwa mereka bisa menjadi target, dibandingkan laki-laki sebanyak 27 persen.



Minimnya kesadaran tersebut membuat perempuan merasa tidak perlu melakukan langkah-langkah keamanan untuk menjaga foto-foto berharga atau informasi sensitif yang tersimpan di perangkat selulernya. Selain itu, sebanyak 19 persen perempuan mengakui bahwa mereka tidak melindungi perangkat mobile dengan kata sandi, dan 14 persen perempuan tidak menggunakan segala bentuk solusi keamanan sama sekali.

Atas dasar itulah CRI menggelar lokakarya terbatas mengenai pentingnya 'Keamanan Digital bagi Kelompok Perempuan' pada Senin, 29 April 2019, di Limasan Griya Jagadhaya, Sewon, Bantul. Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan perempuan terhadap perangkat teknologi, terutama gawai yang menjadi perangkat wajib sehari-hari. Lokakarya ini diikuti oleh 28 perempuan yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga.

Kelompok ibu rumah tangga bisa dikatakan merupakan kelompok paling rentan terdampak negatif teknologi digital. Sehari-hari mereka



berjibaku dengan urusan domestik sehingga hampir tak memiliki akses untuk belajar atau sekadar mengetahui perkembangan teknologi. Hal ini diutarakan oleh Utin Ririn, salah satu peserta yang mengaku bahwa ini pertama kalinya ia mendapatkan pengetahuan mengenai keamanan digital. “Sebagai ibu rumah tangga, saya jarang sekali mendapatkan informasi seperti,” jelasnya.

Lokakarya juga diikuti oleh perempuan difabel yang tergabung dalam Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), Sleman. Salah satunya adalah Lusi Inisiati yang juga aktif menggunakan media sosial, terutama facebook.

Ada tiga hal pokok yang dibagikan dalam lokakarya. Pertama, soal pentingnya keamanan data pribadi terutama dalam penggunaan media sosial. Berdasarkan hasil survei sederhana yang dilaksanakan saat pelatihan, mayoritas adalah pengguna facebook, oleh karena itu peserta diajak berpraktik mengamankan facebook masing-masing. Peserta cukup antusias dalam mengamankan data pribadi. Bagi mereka, hal tersebut tergolong sesuatu yang baru meski telah menggunakan facebook selama bertahun-tahun. Peserta lain, Marsinem, mengaku baru mengetahui bahwa nomor teleponnya selama ini dapat terlihat di akun profil facebooknya.

Kedua, mengenai etika berbagi di media sosial. Peserta diajak untuk menengok kembali konten apa saja yang pernah mereka bagikan di media sosial. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk lebih memperhatikan jejak digital masing-masing dengan mempertimbangkan apa saja yang selama ini mereka bagikan di media sosial. Salah satunya



dengan memberikan beberapa kasus contoh perundungan dan kekerasan yang dialami oleh beberapa pihak terkait dengan jejak digital.

Kasus-kasus tersebut dijadikan contoh agar peserta dapat memahami risiko berbagi di media sosial. Oleh karena itu, alih-alih membuat atau menyebarkan konten negatif di media sosial, peserta diajak untuk membuat konten yang positif. Salah satu bentuk konten positif adalah berbagi pengetahuan yang dapat membantu orang lain, misalnya resep memasak atau tips memperlakukan anak. Pada sesi terakhir membahas tentang perkembangan aplikasi termutakhir agar seluruh peserta dapat memahami persoalan di dunia maya terkini.

Lokakarya ini merupakan agenda pertama dari rangkaian acara Hari Ulang Tahun (HUT) CRI sekaligus sebagai salah satu upaya lembaga untuk terus memperkuat kapasitas perempuan dalam menguasai penggunaan teknologi digital.

Lamia Putri Damayanti



AJW 2019 dan Cerita-Cerita Menarik dari Desa

Malam Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) 2019 sukses digelar pada Sabtu, 29 Juni 2019. Media warga Warta Desa dari Pekalongan dan Radio Komunitas Marsinah FM membawa pulang penghargaan AJW 2019.

AJW awalnya merupakan agenda tahunan BaleBengong, salah satu media warga di Bali, untuk mengapresiasi para pewarta warga. Namun, melalui kolaborasi dengan Combine Resource Institution dan ICT Watch, AJW 2019 menambah dua kategori nominasi, yakni Media Warga dan Pegiat Literasi Digital. “Tujuan penyelenggaraan AJW ini untuk mengapresiasi pegiat jurnalis dan media warga,” jelas Anton Muhajir, salah satu penunggu--istilah yang mereka gunakan untuk menyebut para pegiatnya--BaleBengong.

Sejak pendaftaran dan penominasian dibuka pada April 2019, terdapat 111 yang mengirimkan karya dan mengajukan diri. Daftar tersebut terdiri dari 31 kelompok media warga, 31 orang pewarta warga, dan 49 individu/kelompok pegiat literasi digital. Dari sekian banyak, juri menetapkan dua

pemenang untuk Kategori Media Warga, dua pemenang Kategori Pewarta dan satu pemenang Kategori Pegiat Literasi Digital.

Masing-masing pemenang adalah Sugihermanto yang meraih penghargaan Pewarta Warga subkategori Video, dan I Wayan 'Gendo' Suardana yang mendapat penghargaan Pewarta Warga subkategori Artikel. Untuk Kategori Media Warga, Warta Desa meraih penghargaan subkategori Daring (*Online*) dan Radio Komunitas Marsinah FM untuk subkategori Elektronik. Pada kategori Pegiat Literasi Digital yang berkolaborasi dengan ICT Watch, Rumah Literasi Indonesia keluar sebagai pemenang.

AJW 2019 ditujukan sebagai wadah apresiasi sekaligus kontemplasi untuk pegiat media/pewarta warga dan literasi digital. Menjadi pewarta/media warga adalah salah satu upaya untuk memberdayakan komunitas melalui informasi. Di era internet, kanal-kanal informasi semakin beragam. Situasi ini mendorong warga agar mampu mandiri atas informasi dan tidak lagi bergantung pada media arus utama.

Keberadaan media/pewarta warga sendiri kian mewarnai keragaman informasi. Namun keberadaan media warga menjadi lebih relevan dengan kebutuhan warga oleh karena adanya kedekatan (*proximity*) dengan komunitas. AJW 2019 memberikan contoh konkret bagaimana media/pewarta warga hadir untuk memberdayakan komunitasnya.

Warta Desa, misalnya, adalah salah satu contoh media warga yang mampu mengisi ruang kosong informasi bagi warga di Pekalongan dan sekitarnya. Ketika sedikit atau tak ada media yang



memberitakan mengenai banjir dan dampak pembangunan jalan tol, Warta Desa muncul dan menghadirkan suara-suara warga yang selama ini tidak disorot media. “Berita seperti itu jarang sekali diekspos oleh media arus utama. Padahal informasi terkait hal tersebut sangat dibutuhkan oleh warga,” ungkap Didiek Harahab yang mewakili Warta Desa pada Malam Anugerah AJW 2019.

Pemenang Kategori Pewarta Warga subkategori Artikel, I Wayan Suardana atau yang akrab disapa Gendo, menceritakan pengalamannya mengikuti proses perjuangan Desa Peladung yang menolak eksploitasi air. Gendo tidak hanya menginformasikan apa yang sedang dihadapi Desa Peladung tetapi juga turut terlibat dalam advokasi warga yang bergerak melawan upaya privatisasi air oleh salah satu perusahaan air mineral di Bali. Melalui mekanisme adat, warga Desa Peladung akhirnya memenangi pertarungan tersebut. “Waktu itu saya meminta warga agar mendesak

perusahaan melakukan *voting*. Setelah hasil *voting* keluar, hari itu juga Aqua angkat kaki dari desa,” jelasnya.

Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa baik Warta Desa maupun Gendo telah menjalankan perannya sebagai warga yang tidak hanya menjadi pengelola informasi tetapi juga menjadi pengentas masalah (*problem solver*).

Pewarta dan media warga merupakan kanal informasi utama bagi komunitas, ketika media arus utama tidak dapat menampung suara mereka. Di Jakarta, tepatnya di sekitar Kawasan Berikat Nasional (KBN) Cakung, Radio Komunitas Marsinah FM menjadi ruang aspirasi bagi para buruh perempuan. Sama seperti yang dilakukan oleh Warta Desa dan Gendo, Marsinah FM tidak hanya mewartakan informasi penting terkait buruh, tetapi juga mengadvokasi buruh perempuan agar lebih berdaya. “Kami tidak hanya bersiaran tetapi juga turun langsung ke jalan dan memberikan pelatihan/edukasi untuk buruh perempuan,” jelas Dian Septi.

Dalam hal ini, buruh sering kali dibingkai secara negatif dalam pemberitaan-pemberitaan media arus utama yang berdampak pada jeleknya citra perjuangan kaum buruh. “Marsinah FM menjadi ruang bagi buruh untuk menyuarakan aspirasinya,” ungkap Dian, yang menerima penghargaan mewakili Radio Komunitas Marsinah FM.

Selain buruh yang seringkali ditampilkan bias di media-media arus utama, kelompok penyandang disabilitas juga kerap tersisih. Kehadiran kaum difabel di media arus utama kerap tak sesuai dengan realita. Hal inilah yang menjadi alasan Sugihermanto bergerak menjadi pewarta warga dan fokus terhadap isu-isu kelompok penyandang disabilitas.



Sugihermanto, atau kerap dipanggil Sugi mengungkapkan, bahwa menjadi reporter adalah cita-citanya sejak kecil. Namun, dengan kondisinya sebagai penyandang *low-vision*, ia ragu ada perusahaan media yang mau menerimanya. “Media arus utama mana yang mau menerima penyandang disabilitas?” ujar Sugi pada saat menerima penghargaan AJW 2019, Sabtu (29/06).

Namun demikian, tekad Sugi untuk mewartakan hal-hal di sekitarnya tetap kuat. Melalui perkembangan teknologi yang semakin mudah dan terjangkau, Sugi memilih menjadi pewarta warga. Upaya ini merupakan alternatif baginya untuk mewujudkan impian masa kecil sekaligus menjadi sarana baginya untuk menyuarakan hak-hak kaum difabel. Karyanya yang memenangkan AJW 2019 sendiri bercerita mengenai rekreasi dan tempat wisata dalam perspetif penyandang disabilitas, khususnya tuna netra. Salah satu juri, Dandhy

Pemenang Pegiat Literasi Digital AJW 2019



Laksono, menyebut kekuatan karya Sugi ada pada paradoks yang dimunculkannya. Dalam video bertajuk “Pantai Parang Tritis, Keindahan dalam Kegelapan” Sugi berkisah tentang keindahan dari sudut pandang orang yang justru tidak bisa melihat keindahan itu dengan mata. Sesuatu yang mungkin muskil hadir di media yang mengutamakan profit.

Pada Kategori Pegiat Literasi Digital, Rumah Literasi Indonesia (Banyuwangi) menjadi nominasi terbaik. Penghargaan Pegiat Literasi Digital merupakan diberikan kepada individu/komunitas yang giat memberikan edukasi literasi di lingkungannya--baik secara daring maupun luring. Menurut Tunggul Harwanto, salah satu pegiat yang hadir di Malam Anugerah AJW 2019, mengatakan Rumah Literasi Indonesia memulai gerakan literasi dengan gerakan rumah baca. Mereka mengajak anak-anak muda untuk lebih peka teradap isu-isu sosial lingkungan, terutama mengenai pariwisata.

Persoalan pariwisata menjadi hal yang cukup pelik di Banyuwangi. Tunggul menceritakan bahwa Banyuwangi terus-menerus dicitrakan sebagai situs wisata wajib kunjung, akan tetapi perhatian pemerintah terhadap warganya minim. Selain itu, kearifan lokal dan budaya di Banyuwangi hanya dikomersialisasikan saja tanpa ada pelibatan warga. “Ruang untuk dialektika mengenai isu-isu tersebut





belum ada. Media arus utama belum memberikan ruang bagi urusan-urusan publik yang sebetulnya penting untuk warga. Rumah Literasi Banyuwangi mencoba membuat ruang melalui media warga tersebut,” jelasnya

Dalam hal ini, Rumah Literasi Indonesia juga bergerak mengadvokasi warga, khususnya untuk persoalan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sempat marak diperbincangkan di media sosial. Mereka memanfaatkan media sosial untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak muda terkait dengan hak-hak warga mengenai RTH.

Di samping penyerahan penghargaan, gelaran AJW 2019 juga diramaikan dengan berbagai aktivitas seperti, *meplalianan* (bermain bersama) dan *megibung* (makan bersama) yang mencerminkan semangat kebersamaan dan kesetaraan ala komunitas, serta suguhan musik akustik. Selain itu ada juga diskusi mengenai media warga yang dipantik oleh Dian Septi (Marsinah FM). Didiek Harahap (Warta Desa), Ferdhi F. Putra (CRI) dan Donny BU (Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika RI).

Pada pagi sebelum penyerahan anugerah juga digelar kelompok diskusi terarah (FGD) yang melibatkan para pihak seperti pewarta dan media warga, organisasi masyarakat sipil dan perwakilan Kementerian Kominfo, yang bertujuan untuk merancang model perlindungan hukum bagi pewarta dan media warga. Dewan Pers pun diundang dalam FGD tersebut, namun tidak dapat hadir.

Lamia Putri Damayanti

DATA PRIBADI HARGA MATI

